

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan pada skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia Sebagai Negara berkembang yang sedang berusaha menjadi Negara maju tentunya memiliki masalah dan kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Indonesia ,dan berkembangnya isu-isu internasional, yang semakin dinamis memberikan dampak pada keputusan pengambilan kebijakan luar negeri setiap negara. Isu-isu yang berkembang pada era sekarang tidak hanya berfokus pada isu tradisional, seperti konflik ideologis dan perang, tetapi kini meliputi isu non-internasional. Isu non-tradisional mulai muncul pada tahun akhir 1990an, seperti terorisme, pelanggaran hak asasi manusia, prolifgerasi senjata pemusnah massal, demokrasi, sosial budaya, ekonomi, dan lainnya yang mengancam keamanan, stabilitas nasional dan internasional. Hal ini terjadi karena proses interaksi tidak hanya dilakukan oleh aktor negara, tetapi munculnya aktor non-negara. dll. Termasuk Indonesia.

Intergrasi sebuah kerjasama multilateral sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai permasalahan dan kebutuhan yang ada di dunia ini .Salah Satu bentuk Intergrasi nya ialah Pada 25 September 2013, di sela Sidang Majelis Umum PBB Ke-67, para menteri luar negeri dari Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia bertemu untuk membahas pembentukan sebuah grup konsultatif i[[nformal yang kemudian disebut sebagai MIKTA.

Indonesia sendiri, mengembangkan platform internasional baru terkesan tidak sesuai dengan visi ”diplomasi untuk rakyat” yang menghendaki bahwa kebijakan luar negeri dapat memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

Hal ini dapat dijawab dengan menyelaraskan upaya membangun MIKTA dengan pencapaian kepentingan nasional. Melalui MIKTA, Indonesia mungkin dapat menggali manfaat yang lebih banyak daripada melalui jalur bilateral dalam bekerja sama dengan Korea, Turki, Australia, dan Meksiko, jika hal ini dapat dilakukan, kita dapat mewujudkan apa yang dituliskan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama para Menteri Luar Negeri Meksiko, Korea, Turki, dan Australia: *"21st Century Global Governance: Rise of the Rest"*.

Kemudian Politik luar negeri Indonesia terhadap Forum Kerjasama Internasional , Indonesia Sebagai Negara yang menganut Prinsip Bebas Aktif yang dimulai dari zaman Presiden soekarno yang Strategi tersebut mengharuskan melindungi kepentingan nasionalnya sendiri, tidak selaras dengan kekuatan utama dunia (yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat), sampai kepada zaman Presiden SBY yang Indonesia dapat menjalankan kebijakan luar negerinya secara bebas ke segala arah, memiliki sejuta teman dan nol musuh. sangat membantu mempertahankan pertumbuhan yang mengesankan dalam perdagangan luar negeri dan investasi dan pada zaman Presiden SBY ini Indonesia bergabung dengan salah satu Forum kerjasama Internasional yaitu MIKTA.

Pada era zaman Presiden Joko Widodo sekarang Jokowi ingin kebijakan luar negeri pemerintahannya[untuk menguntungkan orang-orang, yang dasar, dan mengedepankan kerja diplomasi dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat .pada dasarnya Politik luar Negeri Indonesia Para pemimpin Negara di Indonesia menjalankan Politik Luar negeri Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4 yang tujuan demi kepentingan kemajuan bangsa dan Negara Indonesia.dari Era Presiden Soekarno dan sampai era Presiden Jokowi sekarang . dengan demikian fokus kepentingan nasional adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak hanya dicapai

oleh memacu pembangunan di dalam negeri tetapi juga membuka peluang di dunia internasional. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan Politik luar negeri sangat dipengaruhi oleh kepentingan nasional yang menjadi prioritas pemerintah kebijakan luar negeri kemudian menjadi respon dan stimulus yang menghubungkan kepentingan domestik dengan peluang luar negeri. salah satunya dengan Indonesia Bergabung dengan Forum kerjasama Internasional Seperti G20, Asean dan MIKTA.

Kemudian, MIKTA sebagai forum kerjasama internasional negara berkembang yang dibentuk pada tahun 2013 memiliki tujuan diantaranya untuk Sebagai pembangun jembatan dan agenda-setter dalam tatanan global berubah. MIKTA telah berkembang dari awal yang sederhana ke beberapa kerangka, bertemu, proyek, dan penjangkauan. MIKTA telah menjadi tidak hanya tempat untuk berbagi ide dan pengalaman, tetapi juga forum untuk menemukan strategi yang inovatif dan terobosan dalam pengelolaan ketertiban global. Kemudian, sifat dan cara pengambilan Keputusan di MIKTA , MIKTA membentuk identitasnya pada sifat informal jaringan dan sejauh tertinggi, pengambilan keputusan tubuhnya tetap puncak menteri luar negeri MIKTA, lalu untuk pengambilan keputusan di Summit MIKTA dilakukan secara Konsensus atau keputusan bersama, keputusan Secara Konsensus dilakukan melalui Konsultasi yang dilakukan Oleh Menteri Luar Negeri atau utusan dari Negara – Negara anggota MIKTA.

Sejak berdirinya MIKTA pada tahun 2013 sampai sekarang, negara – negara MIKTA sudah pernah semua menjabat sebagai ketua MIKTA mulai dari Meksiko pada tahun 2013 sampai Indonesia menjadi Ketua MIKTA periode 2018/2019, selama menjabat sebagai ketua MIKTA , Negara - Negara MIKTA banyak membuat program –program sesuai dengan tema yang menjadi focus dalam periode kepemimpinan

mereka di MIKTA. lalu di dalam MIKTA sering di adakan pertemuan untuk membahas kinerja MIKTA dan masalah-masalah internasional dan didalam MIKTA juga ada Senior Official Meeting (SOM) kegiatan yang dilakukan oleh Penjabat Senior MIKTA untuk membahas program program yang dilakukan MIKTA dan membahas masalah Internasional secara lebih mendalam dan membahas urgensi bergabungnya Indonesia ke MIKTA. Kemudian berdasarkan fakta yang penulis pahami dari skripsi ini., kepentingan Indonesia bergabung menjadi salah satu negara anggota MIKTA yang didasarkan adanya kepentingan yang ingin dicapai oleh Indonesia yaitu:

1. Indonesia bisa menjalankan diplomasi untuk memperluas pengaruh polugri dalam forum kerjasama internasional dan agenda-agenda global

Indonesia juga memperluas pengaruh politik luar negerinya di agenda – agenda global, Pertama, Indonesia dapat berupaya meyakinkan negara-negara anggota MIKTA untuk mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB dari 2019 hingga 2020.

Kedua, Indonesia dapat mengejar diplomasi ekonominya di dalam MIKTA. Ketiga, Indonesia akan mendorong keterlibatan aktor-aktor non-negara dalam MIKTA Keempat, MIKTA dapat membantu mendukung tujuan Indonesia menjadi tumpuan maritim dunia. Indonesia membayangkan dirinya sebagai pemain utama dalam urusan internasional. MIKTA dengan visi menyatakan amandemen lembaga dan organisasi global, menyediakan Indonesia dengan platform yang berguna dan praktis untuk menyuarakan ide-ide, keprihatinan dan proyek-proyek dalam hal ini dan pada tahun 2018 indonesia dipercaya sebagai ketua MIKTA dengan tema pembinaan ekonomi kreatif dan berkontribusi untuk *Global Peace* dan potensi kerjasama

MIKTA masa depan diantaranya potensi ekonomi karena sebagai grup dialog informal, MIKTA dapat dikatakan mempunyai nilai strategis yang patut dipertimbangkan dalam formulasi polugri. MIKTA mewakili 8 persen total PDB dunia dengan potensi ekonomi 5,9 triliun dollar AS dan 7 persen total populasi dunia atau lebih dari 500 juta penduduk dunia.,total nilai perdangan kelima negara tersebut USD 1.5 triliu dan dan sifat MIKTA yang sebagai forum kerjasama internasional yang fleksibel dan konsulatif memudahkan Negara – negara MIKTA di masa depan untuk berkerjasama dan mengatasi malsalah internasional lebih baik.